

49% PTMA Belum Gunakan Fungsi Teknologi Sosial

SLEMAN (KR) - Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang terlibat dalam penelitian dengan menggunakan teknologi sosial belum mencapai angka 49 persen. Mereka belum menggunakan seluruh fungsi yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan program studinya. Oleh karena itu, perguruan tinggi di lingkungan PTMA didesak mengeksplorasi lebih jauh dan memanfaatkan teknologi sosial yang terdiri pengiriman pesan langsung, telekonferensi, distribusi konten, berbagi dokumen dan kolaborasi serta dan aplikasi media sosial lainnya.

Dosen UMY Punang Amaripuja SE ST MIT mengemukakan hal tersebut saat mempertahankan disertasinya yang berjudul 'The Effect of Collaboration Quality and Social Technology Use on Decision-Making Performance' di Kampus FBE UUI Condongcatur, Senin (6/2).

Bertindak selaku promotor Prof Dr Heru Kurnianto Tjahjono MM dan co-promotor I Prof Dr Muafi dan co-promotor II Dr Wisnu Prajogo. Para penguji ujian terbuka ini Dr Dessy Istinadewi, Prof Dr Widodo dan Dr Mohammad Nabil Almunawar. Setelah pro-

mosi doktor usai, Punang Amaripuja dinyatakan lulus berpredikat sangat memuaskan dengan IPK 3,72 dan menjadi lulusan ke-117 FBE UUI. "Padahal, persyaratan teknis dan ekonomi yang diperlukan untuk menggunakan teknologi sosial relatif rendah dibandingkan sistem berbasis institusi yang lebih formal," tandas Punang.

Pihaknya menyebutkan, penggunaan teknologi sosial diperkirakan meningkat di masa depan dengan semakin banyaknya penduduk asli digital yang masuk ke dunia kerja. Sikap dan perilaku penduduk asli digital relatif terhadap imigran digital sangat berbeda. Karena penduduk asli digital sejak lahir hampir secara eksklusif bergantungan pada teknologi digital. "Dengan pemikiran ini, organisasi diharapkan mempersiapkan integrasi teknologi sosial dalam praktik bisnis, terutama dalam proses pengambilan keputusan," tambah alumnus UGM kelahiran Karanganyar 12 Oktober 1970 ini.

Ia mengingatkan, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara teknologi sosial dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan sangat penting. (Fsy)

Optimalisasi Kurikulum Merdeka

JAKARTA (KR) - Kemendikbudristek secara terus-menerus mengoptimalkan kebijakan Kurikulum Merdeka secara komprehensif dan menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) menyelenggarakan seminar untuk melihat bagaimana Kurikulum Merdeka dilaksanakan di satuan pendidikan. Acara ini ditayangkan juga di kanal Youtube Direktorat Sekolah Dasar.

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan Kemendikbudristek dalam menjawab krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang selama ini terjadi di Indonesia

didikan dalam pengimplementasiannya. Mengusung tema 'Mengenal Lebih Dekat Implementasi Kurikulum Merdeka', kegiatan yang merupakan episode pertama ini merupakan ruang komunikasi berbagi praktik.

Acara ini menghadirkan dua pembicara yaitu Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Direktur Dikmas dan Dikus), Aswin Wihdiyanto dan Guru SDN Pulogebang 02 Andra Octavia.

Aswin Wihdiyanto mengungkapkan, Kurikulum Merdeka yang diluncurkan bersama Platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15, salah satu elemen penting untuk mendorong perbaik-

an pembelajaran. Aswin menambahkan, Kurikulum Merdeka memberi ruang dan waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Selain itu, juga memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri.

Menurut Aswin, aspek fleksibilitas pada kurikulum sangat penting, karena beragamnya kondisi antarsekolah di Indonesia. Dengan kerangka yang fleksibel, Kurikulum Merdeka memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di tempat yang aksesnya sulit, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. (Ati)

UI Sosialisasikan Penerimaan Maba

DEPOK (KR) - Universitas Indonesia (UI) mengadakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru (maba) bagi lulusan dari Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dan sederajat tahun 2023. Sosialisasi ini dalam rangka UI memperluas akses kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di PTN ini.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Abdul Haris di Kampus UI Depok Jabar, Senin (6/2) menjelaskan, salah satu program Pre-University yang merupakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yakni memberikan peluang kepada siswa SMA untuk mengambil mata kuliah di UI tanpa harus menjadi mahasiswa. Jika siswa mendapatkan sertifikat kelulusan dengan baik dari mata kuliah tersebut, sertifikat bisa direkognisi seandainya siswa tersebut mendaftar kuliah di UI.

Dalam sosialisasi disebutkan jalur masuk penerimaan mahasiswa baru UI untuk jenjang sarjana dan vokasi terbagi menjadi dua, yaitu jalur nasional dan jalur mandiri. Pada 2023 UI akan membuka penerimaan

mahasiswa baru dalam program Sarjana, Sarjana Kelas Internasional, Sarjana Kelas RPL, Vokasi dan Vokasi kelas RPL.

Sementara itu Kepala Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI Gunawan menjelaskan, untuk jalur nasional, UI menyediakan 50 persen dari total daya tampung dengan rincian 20 persen melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan 30 persen melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

"Keseluruhan daya tampung akan dibagi pola penerimaannya menjadi jalur nasional dan jalur mandiri," jelasnya.

Tahun ini UI mengikutsertakan 64 program studi sarjana dan 15 program studi vokasi melalui SNBP dan SNBT. SNBP merupakan jalur seleksi nasional yang seleksinya berdasarkan prestasi dan nilai rapor. Sedangkan SNBT seleksi melalui tes matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, literasi dalam Bahasa Inggris dan potensi kognitif.

Saat ini, sedang berlangsung pembuatan akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) bagi sekolah dan siswa dimulai 9 Januari 2023. (Ant)

UKDW Adakan Workshop Metodologi Penelitian

YOGYA (KR) - Penelitian menjadi keharusan bagi akademisi dalam upaya menciptakan produk-produk inovasi di tengah masyarakat. Melalui produk inovasi yang dihasilkan dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) berkolaborasi dengan Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) mengadakan seminar dan workshop metodologi penelitian 'Mixed Method & Research and Development'.

Ketua LPPM UKDW Dr Ing Wiyatiningsih MT me-



KR-Istimewa

Para narasumber dalam acara seminar & workshop metodologi penelitian 'Mixed Method & Research and Development'.

nyampaikan, kegiatan itu bertujuan memberikan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian. Termasuk yang berkaitan perumusan metodologi penelitian yang relevan dengan bidang ilmu masing-masing.

"Semoga acara ini dapat

memberikan manfaat yang baik dan berujung pada peningkatan produktivitas dalam mempublikasikan hasil penelitian. Tema ini diambil karena penelitian harus selalu berkembang termasuk metodologinya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu

hadir sebagai narasumber Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Iwan Sudrajat MSA PhD. Ia mengungkapkan, *mixed methods* adalah pendekatan penelitian yang bersifat pragmatis dan problem centered. Metode dan teori digunakan secara instrumental berdasarkan aplikabilitasnya terhadap proses investigasi yang sedang dilakukan.

"Mixed methods merupakan prosedur penelitian yang melibatkan pengumpulan dan pengintegrasian data kualitatif dan kuantitatif dalam satu proyek. Asumsinya, penggabungan kedua jenis data memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti," paparnya. (Ria)

EKONOMI

NILAI EMISI PASAR MODAL DITARGETKAN RP 200 T

Optimis Industri Keuangan pada Tahun 2023 Membaik

JAKARTA (KR) - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengaku, optimis tahun 2023 optimis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut.

Misalnya kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10-12 persen didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7-9 persen. "Kami optimis tahun 2023 optimis tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut," kata Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan (IJK)2023, di Jakarta, Senin (6/2).

Sementara di sektor pasar modal, nilai emisi ditargetkan sebesar Rp 200 triliun. Di industri keuangan non bank (IKNB), piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh 13-15 persen. Aset asuransi jiwa dan asuransi

si umum diperkirakan tumbuh sebesar 5-7 persen, ditengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset Dana Pensiun diperkirakan juga tumbuh 5-7 persen.

Dipaparkan, pada tahun 2022 peningkatan aktivitas perekonomian domestik dari sisi konsumsi dan investasi telah menjadi penopang pertumbuhan. Hal itu diperkuat oleh pengumuman Pemerintah mengakhiri tanggap darurat pandemi, yang akan menjadi modalitas utama bagi pertumbuhan tahun ini.

"Kami meyakini sebagian besar risiko transmisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk dampak penurunan harga komoditas, penurunan permintaan ekspor dan pengetatan likuiditas

global, sudah dipahami dan dapat dimitigasi dengan tepat," tegasnya.

Tahun ini, siklus politik 5 tahunan juga dimulai. Belajar dari periode lalu, akselerasi pertumbuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas industri akan meningkat, khususnya industri padat karya seperti makanan/minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), percetakan serta transportasi.

"Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk tidak ragu-ragu terhadap penguatan perekonomian, stabilitas keuangan, serta perbaikan iklim dan kesempatan investasi di Indonesia. Investasi langsung maupun investasi portofolio dalam dan luar negeri terus meningkat," paparnya.

Tingginya optimisme terhadap prospek perekonomian nasional tercermin dari perkembangan pasar modal yang mencatatkan penambahan 71 emiten tahun lalu, tertinggi sepanjang sejarah. Kredit

perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh 11,4 persen dan 14,2 persen, lebih tinggi dari rerata 5 tahun sebelum pandemi sebesar 8,9 persen dan 4,4 persen. Sementara investasi nonresiden pada SBN di Januari 2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp 49,7 triliun.

Premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh sebesar 13,9 persen mencapai Rp119 triliun. Namun, premi asuransi jiwa tahun lalu mengalami kontraksi 7,8 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa mutlakannya penyelesaian masalah-masalah perusahaan asuransi jiwa dalam waktu dekat.

Sepanjang tahun 2022, kredit restrukturisasi covid-19 perbankan turun signifikan Rp 469 triliun dari puncaknya sebesar Rp 830 triliun pada Oktober 2020, didukung dengan meningkatnya coverage pencadangan 24,3 persen dari total kredit restrukturisasi. (Lmg)-d

Ketenagakerjaan

MAGDALENA SUKARTONO - LPSDM ABISATYA PARAMITRA



Apakah karyawan kita bermasalah?

Aha! Jawabnya : Bisa YES tapi bisa NO. Kadang juga disebabkan oleh kesalahan si Pemimpin itu sendiri. Misalnya salah menempatkan karyawan di posisi yang tak sesuai dengan ijazah atau kemampuannya. Asal tempatkan . Suka-suka. Karena ada posisi yang kosong. Tak terpikirkan efeknya, mungkin atau sudah pasti tidak efektif atau tidak produktif. Karena tak sesuai bidang dengan kemampuannya.

Seperti apakah definisi karyawan bermasalah ?

Menurut Marty Brounstein dikatakan, 1.karyawan bermasalah adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi standar kinerja pekerjaannya sesuai tuntutan organisasi atau manajemnya.

2. Karyawan bermasalah tidak selalu berperangai buruk.

3. Karyawan bermasalah adalah karyawan yang tidak bisa mencapai standar.

Bagaimana atasan harus menghadapinya ?

Perlu diingat, bahwa baik karyawan maupun manajer pasti pernah suatu kali gagal, tak sesuai dengan harapan pimpinan atau target perusahaan . Sebab itu yang harus dilakukan yaitu mengeluarkan masalah dari karyawan itu. Bukan mengeluarkan karyawannya. Perlu diingat, bahwa keluar masuknya karyawan berdampak kerugian pada perusahaan & biaya. Misalnya :

1. Waktu dan biaya merekrut & mengangkat karyawan baru. 2. Melatih karyawan baru agar bisa melaksanakan tugas dengan baik. 3. Hilangnya gaji & biaya yang telah dibayarkan kepada karyawan yang di PHK. 4. Kompensasi PHK, dan uang pesangon yang harus dikeluarkan. 5.Rusaknya semangat kerja karyawan yang ada. 6. Kemungkinan adanya tuntutan hukum akibat PHK yang keliru.

Yang jadi pertanyaan kita pasti : apa saja yang jadi kriteria karyawan bermasalah ? Nah, dicatat ya Bro & Sis atau Bapak & Ibu . Kriteria karyawan bermasalah yaitu :

1. Karyawan baru, belum pengalaman kerja.
2. Karyawan yang tidak konsisten.
3. Karyawan yang tidak seimbang. Misalnya punya kelebihan pada aspek teknik, tapi lemah pada perlakunya.
4. Karyawan asal kerja.
5. Karyawan marjinal.
6. Karyawan yang tidak bisa ditoleransi. Golongan ini termasuk karyawan toxic menurut istilah yang dipakai Anthony Dio Martin.

Nah, itulah sebagian gambaran tentang karyawan bermasalah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah : Apakah karyawan kita bermasalah ? □ -d

Travex ATF, Kesempatan Emas Bangkitkan Pariwisata DIY

YOGYA (KR) - Ajang kepariwisataan terbesar di ASEAN, ASEAN Tourism Forum (ATF) yang digelar di DIY sejak 2 hingga 5 Februari 2023 menjadi momentum sekaligus kesempatan emas, untuk menggenjot kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) nantinya. Sebab dengan bangkitnya industri pariwisata tersebut maka akan memberikan multiplier effect yang besar, salah satunya bagi pelaku UMKM maupun ekonomi kreatif (ekraf)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Budiharto Setyawan mengatakan, perekonomian DIY ditopang pariwisata, pendidikan dan pertanian selama ini. Namun dua sektor yang menjadi penopang utama perekonomian DIY yakni pariwisata dan pen-

didikan. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung pengembangan di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan mobilitas yang tidak lain adalah pariwisata.

"Momentum ATF 2023 bisa dimanfaatkan tidak hanya mendongkrak wisman tetapi sekaligus wisatawan domestik untuk datang ke DIY. Kunjungan wisatawan ini tidak hanya sekadar meningkatkan dari segi jumlah semata tetapi memberikan multiplier effect ke berbagai sektor pendukung pariwisata," katanya kepada KR, Senin (6/2).

Budiharto mengaku dirinya optimis, namun tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi perekonomian terkini. Mengingat Pemerintah telah mencabut status PPKM maka mobilitas masyarakat juga semakin leluasa. Hal inilah yang harus tetap diwas-

padai dari ekonomi yang berbasis kerumunan.

Ketua Pelaksana ATF 2023 sekaligus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DIY GKR Bendara mengatakan, forum B2B yang dikemas dalam Travel Exchange (Travex) ATF 2023 berjalan cukup lancar selama tiga hari penyelenggaraan di JEC. Dengan bertemunya para buyer dan seller di Travex inilah,

diharapkan terjadi transaksi supaya industri pariwisata cepat pulih.

"Sesuai target kami sebagai panitia, agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kalau target nominal terus terang kami tidak mematok dari segi angka. Sebab transaksi untuk B2B itu sulit diprediksi karena ini long term bisnis, tidak bisa hari ini saja paling tidak kerja samanya



KR-Fira Nurfiani

GKR Bendara tengah mengunjungi Travex ATF 2023 DI Hall B dan C JEC